



JEP

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 – 9595

Volume 7 No 3 Nopember 2018

Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali
Putu Widi Suryawan Ratha, Surya Dewi Rustariyuni

Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi
Usaha Mikro Kecil Di Kota Metro
Tiara Julian Jaya

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal
Di Kabupaten Lampung Barat
Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher

Pengaruh Pengungkapan (*Disclosure*)
Terhadap Biaya Dana Perusahaan
Tri Joko Prasetyo, Doni Warganegara, Marselina

Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan
Pengembangan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota
**Musbatiq Srivani, Weriantoni Weriantoni, Lukman Lukman,
Erizal Erizal, Zumaila Utami, Fini Fibriani**

Effect Of Modern Market Existence (Minimarket) On Staple Food
Trader Performance In Traditional Markets (Case Study of Sub
District of Seputih Surabaya, Central Lampung Regency)
Wiwit Suryani, Lies Maria Hamzah

Optimasi Penggunaan Sumber Daya Usahatani Sayuran
(*Hortikultura*) Pola Tumpangsari (Studi di Desa Rulung Sari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Muhiddin Sirat, Budiyanto

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145
e-mail : jepep.feb@gmail.com
website : ep.feb.unila.ac.id

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.Sc. (Rektor Universitas Lampung)
Pembina	: Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. (Dekan FEB Unila) : Warsono, Ph.D (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unila) :
Pemimpin Umum	: Dr. Nairobi, S.E., M.Si. (Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB Unila)
Dewan Editor	
Ketua	: Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
Anggota	Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E Dr. Dwi Wulandari, S.E., M.M Dr. Diah Setyorini Gunawan, S.E., M.Si Dr. Wasiturrahma, S.E., M.Si
Redaksi Pelaksana	
Ketua	: Deddy Yuliawan, S.E., M.Si.
Sekretaris	: Emi Maimunah, S.E., M.Si.
Bendahara	: Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si.
Tata Usaha dan Kearsipan	: Sahidin, S.E.
Alamat Redaksi	: Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng – Bandar Lampung 35145
Email	: jepep.feb@gmail.com
Website	: ep.feb.unila.ac.id

Jurnal Ekonomi Pembangunan merupakan media komunikasi ilmiah, diterbitkan tiga kali setahun oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, berisikan ringkasan hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga terbitan volume 7 nomor 3 Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ini dapat diselesaikan. Terbitan volume 7 nomor 3 ini dalam dua versi yakni cetak dan online. Versi online menggunakan open journal system (OJS) melalui alamat <http://jurnal.feb.unila.ac.id/> Perubahan ini berdasarkan masukan dari berbagai kalangan guna mempermudah dalam proses peningkatan status jurnal (Akreditasi).

Sekali lagi kami berharap, dengan terbitan Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ini dapat memfasilitasi dosen, alumni jurusan Ekonomi Pembangunan baik dari Strata-1, Strata-2 maupun program Doktor serta masyarakat ilmiah lainnya dalam menuangkan ide-ide keilmuan kedalam bentuk tulisan ilmiah.

Ucapan terima kasih tak hentinya kami sampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang terus mendukung terbitnya Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) ini. Harapan kita terbitan Volume 7 Nomor 3 bulan Nopember 2018 dengan tampilan yang telah menyesuaikan dan akan terus disesuaikan dengan format jurnal terakreditasi dapat mendukung dalam rangka meningkatkan status jurnal menjadi jurnal nasional terakreditasi, oleh karenanya sumbang saran semua pihak untuk kemajuan dan kelangsungan jurnal ini tetap kami harapkan. Dan akhirnya kami berharap agar jurnal ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Nopember 2018
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Kajur

Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP 19660621 199003 1003

Daftar Isi

Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Putu Widi Suryawan Ratha, Surya Dewi Rustariyuni	261 - 284
Analisis Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Nilai Produksi Usaha Mikro Kecil Di Kota Metro Tiara Julian Jaya	285 - 294
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher	295- 318
Pengaruh Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) Terhadap Biaya Dana Perusahaan Tri Joko Prasetyo, Doni Warganegara ,Marselina	319 - 328
Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Musbatiq Srivani, Weriantoni Weriantoni, Lukman Lukman, Erizal Erizal, Zumaila Utami, Fini Fibriani	329 - 346
Effect Of Modern Market Existence (Minimarket) On Staple Food Trader Performance In Traditional Markets (Case Study of Sub District of Seputih Surabaya, Central Lampung Regency) Wiwit Suryani, Lies Maria Hamzah	347 - 368
Optimasi Penggunaan Sumber Daya Usahatani Sayuran (<i>Hortikultura</i>) Pola Tumpangsari (Studi di Desa Rulung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) Muhiddin Sirat, Budiyanto	369 - 388

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher
annisa260294@gmail.com, toto.gunarto@yahoo.co.id
arivinaratih@gmail.com

Abstract

This thesis focuses on selecting the best strategy for West Lampung district in developing its area, by using SWOT and AHP analysis approach. This study uses two questionnaire instruments, namely SWOT questionnaire and AHP questionnaire. The result of this research concludes that the development target that must be prioritized is to build the supporting infrastructure of agriculture to develop the leading commodity center area.

Keyword: Policy strategy, disadvantaged regions development, SWOT, AHP.

Pendahuluan

Tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik, memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, dan meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih efektif dan efisien.

Faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang stabil, sumber daya manusia yang berkualitas, kemampuan keuangan daerah yang baik, infrastruktur yang memadai, dan kemudahan akses pelayanan publik di daerah. Apabila

daerah tidak mampu menciptakan faktor-faktor pendukung sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, maka tujuan pembangunan daerah akan sulit dicapai. Kegagalan dalam mengembangkan faktor pendukung tersebut menyebabkan timbulnya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan, yang berakibat pada munculnya daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang (Syahza, 2012).

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal (Bappenas, 2006). Sedangkan menurut Kepmen PDT nomor 1 tahun 2005 tentang Strategi

Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, daerah tertinggal didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator.

Target nasional penanggulangan daerah tertinggal sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019, sebanyak 122 kabupaten tertinggal, dimana dua diantaranya berada di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat.

Daya dukung dan perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat begitu besar, sehingga Kabupaten Lampung Barat mampu menjadi pendistribusi sayur-mayur ke daerah-daerah lain seperti Bandar Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Padang, dan mulai juga menyuplai sebagian Jabotabek.

Potensi pertanian, perkebunan dan pariwisata begitu besar dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat, apabila didukung dengan sumber daya manusia yang baik maka Kabupaten Lampung Barat akan

keluar dari sebutan daerah yang tertinggal. Sehingga apabila Kabupaten Lampung Barat ingin keluar dari status daerah tertinggal maka dalam strategi kebijakannya harus memperhatikan penyebab dari terjadinya kesenjangan atau gap masalah-masalah tersebut, dengan tetap mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia dan aksesibilitas.

Besarnya potensi yang ada di Kabupaten Lampung Barat ternyata masih belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terlepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal.

Ketimpangan antara potensi daerah yang telah diusahakan dan telah menjadi "branding" daerah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap upaya-upaya pembangunan daerah yang ingin terlepas dari statusnya sebagai daerah tertinggal, dan justru menimbulkan banyak ketidaksinkronan antara rencana tujuan dan target yang tercapai.

Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor

dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis.

Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya (Arsyad, 2010). Dasar pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta konsentrasi kegiatan ekonomi juga berbeda. Menurut Anwar (1996), teori-teori yang menjelaskan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- *Inward-looking Theories*. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah diakibatkan oleh faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah itu sendiri.
- *Output Oriented Theories*. Teori ini menganggap bahwa adanya mekanisme yang mendasari fenomena pertumbuhan daerah dari satu daerah ke daerah lainnya.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Khuldun Munji, mendefinisikan pembangunan daerah sebagai

usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional, dan global.

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keadaan daerah, yang meliputi keadaan sosial, politik, budaya, keamanan, fisik daerah dan sarana umum;
- Rencana pembangunan, yang meliputi tujuan, sasaran, target pembangunan, strategi dan rencana pembangunan;
- Sarana pembangunan, yang meliputi kelembagaan, dana, sumber daya manusia, dan sumber daya alam yang tersedia;
- Pengaruh luar, yang meliputi keadaan sosial, politik, ekonomi, keamanan dunia dan kekuatan yang secara khusus mempengaruhi;
- Pelaksanaan, yang meliputi ketentuan- ketentuan serta

pengaturan dan pelaksanaan rencana pembangunan.

Daerah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004), daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau wilayah - wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Menurut Bappenas (2004), wilayah tertinggal secara umum dapat dilihat dan ditentukan berdasarkan letak geografisnya yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu wilayah tertinggal di pedalaman dan wilayah tertinggal di pulau-pulau terpencil. Untuk mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami

ketertinggalan dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional.

Konsep dan Definisi Strategi

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai (Umar, 2001).

Perencanaan strategis pada dasarnya tidak menganut satu proses yang standar dan banyak sekali variasi proses yang ditawarkan oleh pustaka-pustaka tentang perencanaan strategis (serta tergantung juga dengan dengan bidang tempat perencanaan strategis tersebut diaplikasikan).

Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian

Daerah penelitian adalah kabupaten tertinggal di provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.

Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018. Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling atau memilih sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu :

- Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah tertinggal menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019.
- Masih banyaknya potensi ekonomi, khususnya sumberdaya lokal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka dan wawancara dengan responden terpilih (Purposive Sampling) berdasarkan kemampuan dan keterlibatannya dengan masalah yang diteliti baik secara internal maupun eksternal untuk mendapatkan masukan pada

indikator strategi SWOT dan AHP yang akan diteliti.

- Dokumentasi

Dokumentasi tersebut berasal dari Bappeda Kabupaten Lampung Barat dan BPS Kabupaten Lampung Barat.

- Survey

Survey merupakan satu tahapan untuk mencari informasi dari responden. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan kuesioner. sebagai alat pengambilan data pokok dimana pada umumnya yang merupakan unit analisa dalam penelitian survei adalah responden kunci.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode analisis, yaitu metode deskriptif dan metode kuantitatif. Untuk menyusun strategi dilakukan dengan melalui tiga tahap analisis, yakni tahap masukan, tahap penggabungan, tahap keputusan. Tahap akhir analisis kasus adalah memformulasikan keputusan yang akan diambil.

- **Analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)**

Konsep analisis SWOT memberikan suatu pandangan dasar tentang strategi atau taktik

yang diperlukan dalam mencapai tujuan tertentu. Analisis SWOT mengkaji dengan menilai faktor-faktor terkait. Untuk perumusan strategi dan mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi faktor eksternal dan faktor internal, kemudian membandingkan antara faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) (Rangkuti, 2001). Tahapan-tahapan dalam melakukan analisis SWOT dilakukan sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Penyusunan Kuisisioner
- Penilaian terhadap faktor-faktor
- Penentuan Responden

Adapun responden yang diminta melakukan penilaian faktor-faktor internal dan eksternal dalam kuisisioner SWOT adalah sebagai berikut.

- *Analytical Hierarchy Process (AHP)*

Menurut Hutasoit (2005) dari hasil

analisa SWOT didapatkan beberapa alternatif kebijakan perpaduan faktor internal dan eksternal yang belum tentu seluruhnya dapat dilakukan secara bersamaan atau simultan karena berbagai keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu lebih lanjut dilakukan pemilihan prioritas untuk mendapatkan strategi kebijakan yang perlun mendapat perhatian

lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penentuan prioritas dari alternatif-alternatif kebijakan yang telah dipilih melalui SWOT pada penelitian ini dilakukan dengan analisa AHP.

- Dalam penelitian ini, hirarki yang akan digunakan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang terbaik yang digunakan merupakan hasil dari analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya. Hirarki dari metode ini, dibagi menjadi *Goal*, *Skenario*, *Sasaran*, *Strategi*.
- Penilaian Kuisisioner AHP, proses ini merupakan proses yang penting dalam penggunaan model AHP, dimana dalam proses ini dilakukan

perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar berbagai kriteria yang telah ditetapkan.

- Penentuan responden, bertujuan untuk menjaring persepsi responden sebagai *expert* untuk menghasilkan data primer.
- Perumusan Strategi, pengolahan data dengan metode AHP ini dilakukan dengan memberikan bobot kepada masing-masing responden. Pemberian bobot ini didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman para responden dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, berperan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dan dianggap memiliki pengetahuan yang cukup mendetail mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Hasil Dan Pembahasan

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Lampung, yang terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan

hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung. Topografi Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi dua yaitu daerah berbukit dengan ketinggian 600m sampai 1000m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Balik Bukit dan Sumber Jaya serta daerah pegunungan dengan ketinggian 1000m sampai 2000m dari permukaan laut meliputi sebagian besar Kecamatan Belalau, Sekincau dan lainnya. Sebagian besar wilayah Lampung Barat berlereng miring sampai sangat terjal sebesar 70 persen dari seluruh luasan wilayah Lampung Barat.

A. Analisis SWOT

Secara ringkas hasil perumusan matriks IFAS – EFAS, berdasarkan strategi SO, ST, WO, dan WT, dilakukan pembobotan penilaian untuk menentukan skala prioritasnya. Susunan strategi alternatif berdasarkan urutan prioritasnya yang diperoleh dari pembobotan matriks interaksi SWOT disajikan pada tabel berikut.

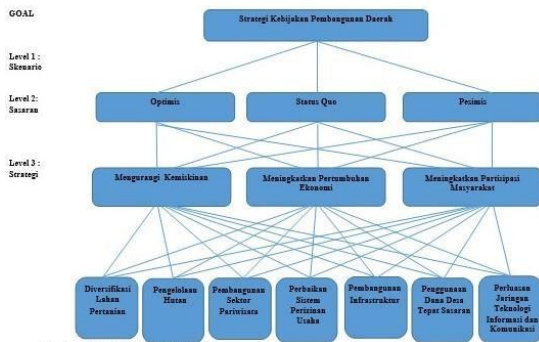
Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

Tabel Pembobotan Hasil Kuisisioner SWOT

	S = 2,54	W = 0,72
O = 2,75	SO = 5,29	WO = 3,47
T = 0,62	ST = 3,16	WT = 1,34

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari hasil pembobotan kuisisioner, maka disusun prioritas strategi berdasarkan kombinasi strategi yang memiliki nilai paling tinggi



Sumber : Hasil Analisis SWOT

Gambar 4.5 Hirarki Model AHP

sampai yang paling rendah.

Tabel Urutan Alternatif Strategi SWOT

Prioritas	Strategi	Bobot Nilai
I	Strength – Opportunity (SO)	5,29
II	Weakness – Opportunity (WO)	3,47
III	Strength – Threat (ST)	3,16
IV	Weakness – Threat (WT)	1,34

Sumber: Matriks Interaksi IFAS-EFAS

Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength*

– *Opportunity* (SO), yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat, karena dari sisi faktor internal, Kabupaten memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan dari sisi faktor eksternal, peluang yang ada jauh lebih besar daripada ancaman dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut

Analisis AHP

Berdasarkan data-data dan perhitungan dari hasil penilaian responden atas kuisisioner AHP tersebut, maka diperoleh hasil urutan prioritas berdasarkan nilai prioritas tertinggi ditampilkan pada tabel berikut.

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

Tabel Hasil pengolahan AHP Dengan Skenario Optimis

Level	Definisi	Bobot Lokal
1	Skenario	
	1. Optimis	0.7366
	2. Pesimis	0.1186
	3. Status Quo	0.1359
2	Sasaran	
	Optimis	
	1. Mengurangi kemiskinan	0.1517
	2. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi	0.5567
	3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	0.1487
3	Alternatif strategi	
	1. Optimalisasi lahan pertanian dan perkebunan, perbaikan fungsi lahan, diversifikasi produk olahan kopi berupa industri kopi bubuk dan kopi luwak.	0.1897

Level	Definisi	Bobot Lokal
2.	Pengelolaan sumberdaya hutan, dengan menetapkan tata hutan sehingga di dapat zona hutan sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan dengan tata batas maupun penatagunaan hutan, serta dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.	0.1153
3.	Perbaikan sistem perizinan yang cepat,mudah, dan murah, untuk memacu pertumbuhan investasi	0.1530
4.	Pembangunan sektor pariwisata berbasis <i>eco tourism park</i> , dan wisata budaya	0.0976
5.	Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan	0.1963
6.	Penggunaan dana desa tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0.1611
7.	Perluasan cakupan layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	0.0873

Sumber: Hasil pengisian kuisisioner oleh para responden (diolah dengan software Expert Choice)

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, skenario yang dianggap paling realistis adalah Skenario optimis, dengan sasaran

yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka urutan prioritas kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel Urutan Prioritas Strategi Kebijakan dengan Skenario Optimis

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Pembangunan infrastruktur	0.196
II	Optimalisasi lahan pertanian	0.190
III	Penggunaan dana desa tepat sasaran	0.161
IV	Perbaikan sistem perizinan usaha	0.153
V	Pengelolaan hutan	0.115
VI	Pembangunan sektor pariwisata	0.098
VII	Perluasan jaringan TIK	0.087

Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan pengolahan data menggunakan metode AHP, untuk mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi didapatkan prioritas strategi kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut :

- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan. Melihat perkembangan produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata yang sangat potensial di Lampung Barat

pengembangan infrastruktur yang diusulkan adalah pengembangan pelabuhan. Pelabuhan yang ada di Kabupaten Lampung Barat belum optimal fungsinya. Saat ini kebijakan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung barat adalah prioritas pembangunan infrastruktur jalan dan sarana transportasi pendukung, seperti jalan kabupaten dan lingkungan, penataan infrastruktur Kota Liwa sebagai ibu kota Lampung Barat, penyelesaian pembangunan stadion, penyediaan sarana air bersih, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan untuk warga Kabupaten Lampung Barat, termasuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di wilayah perdesaan Lampung Barat, seperti di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh dan Pagar Dewa.

- Optimalisasi fungsi lahan pertanian, perbaikan fungsi lahan, diversifikasi produk olahan hasil pertanian dan perkebunan. Selama ini diversifikasi pertanian di Kabupaten Lampung Barat mengalami stagnansi. Seringkali petani hanya menjual kopi dalam bentuk biji, lada dan cengkeh

yang belum dikemas dengan harga jual rendah. Melalui kerja sama dengan kelompok tani di Kabupaten Lampung Barat, diversifikasi produk olahan hasil pertanian dan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat dimulai dari cara pengolahan produk kopi yang sebelumnya masih berupa biji kopi menjadi kopi bubuk (baik kopi robusta maupun kopi luwak) yang dikemas dalam kemasan siap jual. Selain itu juga dilakukan diversifikasi usaha produk tani kopi dengan komoditas musiman yaitu pisang, cabe rawit, lada dalam bentuk butir dan bubuk yang sudah dikemas, cengkeh yang sudah dikeringkan dan dikemas dan kakao dalam bentuk biji dan bubuk yang secara berkala didistribusikan ke Jakarta melalui Bandar Lampung dengan tujuan harga jual dari hasil olahan produk pertanian dari Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai jual tinggi

- Penggunaan dana desa tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat membuat kebijakan mendorong

penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan kabupaten.

- Perbaiki sistem perizinan yang cepat, mudah dan murah untuk memacu pertumbuhan investasi. Langkah atau strategi yang dapat ditempuh untuk merangsang iklim investasi yang baik yaitu dengan perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah dan murah dengan tidak mengabaikan kehati-hatian dengan tujuan peningkatan laju investasi dan mengembangkan kerja sama dengan pihak luar. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengeluarkan kebijakan yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat

menggairahkan investasi.

- Pengelolaan hutan dengan menetapkan tata hutan sehingga di dapat zona hutan sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan dengan tata batas maupun penatagunaan hutan, kemudian dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan merupakan upaya

pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Di Sumber Jaya, Lampung Barat, dalam penerapan HKM di tingkat lapang, selain penguatan kelembagaan masyarakat, juga dilakukan penguatan teknis meliputi: teknis konservasi lahan dan optimalisasi tanaman dengan pola tajuk tinggi, sedang dan bawah. Proses perubahan tutupan lahan yang semula degradasi menjadi sistem hutan kebun melalui agroforestri diyakini dapat mendukung mitigasi perubahan iklim ("Climate Change"). Berikut ini sisi positif dari HKM di Kabupaten Lampung Barat :

- Pada tahun 2005, beberapa bagian wilayah hutan sudah

berubah menjadi kebun campuran dengan jenis tanaman kemiri, alpukat, nangka, durian, mahoni, cempaka, sukun, pinang, dan lain-lain.

- Sebelum masyarakat membentuk kelompok HKm, pada tahun 1994 ditemukan banyak titik api pada kawasan hutan lindung reg 39. Setelah mengikuti kegiatan HKm, melalui optimalisasi tanaman, ditemukan penurunan luasan titik api pada lokasi tersebut.
- Aktivitas HKm dan pengembangannya juga menuju 3 dari 7 misi Millenium Development Goals (MDG's) yaitu mengurangi kemiskinan, pelibatan kaum perempuan (gender perspective) dan pelestarian lingkungan.

Pariwisata berbasis eco tourism park dan wisata budaya. Selama ini potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Barat seperti wisata pendidikan ke Situs Megalitikum di Batu Brak, wisata budaya Desa Lumbok, wisata religi Masjid Islamic Center Baitul Mukhlisin dan wisata – wisata alam yang tidak terawat dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dan tidak adanya biro wisata setempat. Salah satu strategi yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Barat adalah dengan pengembangan pariwisata berbasis Eco Tourism. Di dalam prosesnya, Eco Tourism haruslah melibatkan pihak masyarakat untuk membangun dan menjaga sarana, prasarana dan infrastruktur akses pendukung pariwisata alam, budaya, religi dan pendidikan. Selain itu pemerintah bersama dengan masyarakat juga harus menjaga dan merawat situs – situs atau lokasi – lokasi wisata yang ada seperti wisata pendidikan di Situs Megalitikum Batu Brak, wisata alam Gunung Seminung, Danau Ranau, Bukit Mandi Angin, Gunung Pesagi, Kubu Perahu dan Danau Suoh. Kemudian melakukan promosi – promosi pariwisata yang lebih baik melalui biro wisata yang ada baik di Kabupaten Lampung Barat maupun biro wisata nasional.

- Perluasan cakupan layanan teknologi, informasi dan komunikasi. Strategi yang dapat diajukan berupa membuka kerjasama dengan perusahaan provider demi perluasan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi akses informasi yang

lebih luas seperti :

- Pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan.
- Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota kabupaten.
- Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS (Base Transceiver Station) untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama. Rencana pengembangan teknologi komunikasi harus didukung oleh rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten Lampung Barat, meliputi:
 - Pengembangan/ peningkatan jaringan distribusi tegangan menengah ke pusat kegiatan fungsional.
 - Pengembangan dan peningkatan kualitas gardu-gardu listrik untuk meningkatkan daya energi listrik pada kawasan-kawasan pusat pertumbuhan.
 - Peningkatan jaringan distribusi pada lingkungan pemukiman

baru di kawasan perwilayahan.

- Peningkatan gardu pendistribusian listrik pada kawasan yang diprioritaskan.

Kesimpulan

- Faktor Kekuatan (Strength) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan dapat menjadi solusi masalah di daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:
 - Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah pertanian dan perkebunan
 - Potensi pariwisata yang ada sebagai modal dasar pengembangan sektor pariwisata
 - Masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan kerukunan antar suku dan agama
 - Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Lampung barat baik dengan nilai rating B
 - Merupakan hulu dari 3 DAS, berperan penting sebagai daerah penyangga dan penjaga sistem hidrologi bagi daerah hilir di provinsi Lampung

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

- 59,25% merupakan kawasan hutan, sumberdaya tinggi untuk pelestarian plasmanutfah, pendidikan, penelitian, jasa lingkungan, pariwisata, dan mitigasi bencana
- Adanya satgas bencana hingga di tingkat kecamatan
- Ketersediaan sarana kesehatan seperti rumah sakit Rujukan dan puskesmas disetiap kecamatan
- Faktor Kelemahan (Weakness) utama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:
 - Pola pengolahan dan pemanfaatan lahan, belum memperhatikan kaidah-kaidah konservasi
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
 - Pemerataan hasil-hasil pembangunan daerah
 - Pendapatan Asli Daerah dan Struktur APBD Kabupaten Lampung Barat
 - Posisi Kondisi topografi Kabupaten Lampung Barat bervariasi (dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah dengan susunan bebatuan yang berbeda- beda)
- Keberadaan hutan masih memicu terjadinya konflik tenurial, sosial, dan perizinan pemanfaatan untuk kebutuhan dasar (kesejahteraan)
- Konektivitas antar pusat-pusat produksi, pengolahan hingga pasar
 - Kurang memadainya sarana dan prasarana mitigasi kebencanaan (mobilisasi, jalur evakuasi, tampungan air, dll)
 - Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
 - Rata-rata produksi hasil perkebunan kopi masih rendah bila dibandingkan negara penghasil kopi lainnya
 - Infrastruktur terbangun belum memadai untuk peningkatan akses pelayanan baik menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih, listrik, sanitasi, perumahan)
- Faktor Peluang (Opportunity) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah:
 - Berbagai Undang-undang tentang otonomi daerah dan

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam upaya pembangunan Kabupaten Lampung Barat

- Berbagai program pemerintah pusat dalam upaya mendukung pembangunan di Kabupaten Lampung Barat
- Ketersediaan dana desa dan pusat serta propinsi sebagai komitmen peanggunan desa tertinggal
- Penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat
- Janji politik kepala daerah untuk menjadikan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kabupaten Tangguh Bencana
- Kondisi sosial politik di Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mendukung pembangunan
- Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah
- Kemajuan teknologi yang sangat pesat dalam upaya meningkatkan efisiensi di lingkungan.
- Faktor Ancaman (Threat) yang utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Barat adalah:

- Persaingan produk hasil perkebunan sejenis dengan daerah lain
- Fluktuasi harga komoditas hasil perkebunan
- Investasi swasta di lingkungan Kabupaten Lampung Barat
- Globalisasi, pasar bebas dan keterbukaan ekonomi dunia
- Daerah rawan bencana alam tanah longsor, banjir dan gempa bumi
- Berdasarkan hasil pembobotan terhadap kuisisioner SWOT, maka usulan strategi alternatif yang dapat direkomendasikan adalah Strategi Strength – Opportunity (SO), yaitu suatu strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan alternatif strategi sebagai berikut:
 - Optimalisasi lahan pertanian, perbaikan fungsi lahan, diverifikasi produk olahan hasil pertanian dan perkebunan.
 - Pengelolaan sumberdaya hutan, dengan menetapkan tata hutan sehingga di dapat

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

zona hutan sesuai karakteristiknya baik yang berhubungan dengan tata batas maupun penatagunaan hutan, serta dilakukan penyusunan rencana pengelolaan hutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

- Pembangunan sektor pariwisata berbasis eco tourism park, dan wisata budaya
- Perbaiki sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah, untuk memacu pertumbuhan investasi
- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan
- Penggunaan dana desa tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kemajuan sektor pertanian dan pariwisata.
- Perluasan cakupan layanan infrastruktur teknologi, telekomunikasi dan informasi.
- Prioritas Kebijakan Pembangunan
- Prioritas kebijakan pembangunan daerah dalam

rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- Pembangunan infrastruktur
- Optimalisasi lahan pertanian
- Penggunaan dana desa tepat sasaran
- Perbaiki sistem perizinan usaha
- Pengelolaan hutan Pembangunan Sektor pariwisata
- Perluasan jaringan teknologi, telekomunikasi, dan informasi.

Implikasi Manajerial

- Untuk peningkatan aksesibilitas dapat diusulkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memulai konektivitas Kabupaten Lampung Barat ini dengan pengiriman hasil perkebunan berupa damar didaerah sekitar kroi yang terkoneksi dengan pelabuhan kroi, kakao di Tanggamus yang terkoneksi dengan Pelabuhan Batu Balai, hasil perikanan di selat sunda yang terkoneksi dengan dermaga Bengkunt, potensi padi, kakao, pisang di Pesawaran melalui Gedong Tataan dan Padang Cermin di

distribusikan ke Bandar Lampung lalu melalui terminal agribisnis dipasarkan di Jakarta dan melalui Pelabuhan Panjang di ekspor ke Jepang maupun Timur Tengah. Produk perkebunan kelapa, kopi dan lada dari Tanggamus di distribusikan ke pusat pengumpul Kota Agung. Demikian juga dengan produk peternakan sapi dan kambing. Dari Kota Agung di bawa ke Bandar Lampung dan melalui Pelabuhan Panjang di bawa ke pemasaran baik yang ada di Pulau Jawa maupun daerah lain di Indonesia maupun yang diekspor ke luar negeri seperti Amerika, Jepang, Timur Tengah dan Eropa. Melihat perkembangan produksi baik pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata yang sangat potensial di Lampung Barat, pengembangan infrastruktur yang diusulkan adalah pengembangan pelabuhan.

Prioritas bisa ditujukan kepada dua pelabuhan yang bisa dikembangkan seperti Pelabuhan di Bengkuntan dan Pelabuhan di Kota Agung. Termasuk memikirkan tempat

pengolahan produk- produk tersebut seperti pengemasan udang, pengolahan kopi, lada, damar, kelapa sehingga menghemat biaya transportasi yang selama ini mengharuskan melalui Bandar Lampung dari Kota Agung. Sehingga transportasi Kabupaten Lampung Barat dapat memiliki aksesibilitas lebih baik.

- Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk memberikan dukungan agar peran petani menjadi maksimal. Dukungan tersebut berupa bantuan modal, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, teknologi pertanian, sarana prasarana produksi pertanian dan pengembangan kelembagaan (pemerintah atau swasta) sehingga pembangunan pertanian dapat dilaksanakan lebih terarah. Selain itu disarankan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menggunakan metode transformasi pertanian yang dilaksanakan dengan pendekatan Sistem Pertanian-Bioindustri berkelanjutan yang mencakup Sistem Usaha Pertanian Terpadu pada tingkat

mikro usahatani, sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat pasar atau rantai pasok dan Sistem Pertanian Biorefinery terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem tersebut berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti sistem integrasi tanaman-ternak-ikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas, bioelektrik) atau sistem integrasi usaha pertanian biorefinery yang termasuk pertanian hijau merupakan pilihan sistem pertanian masa depan yang cocok diterapkan di Kabupaten Lampung Barat, karena tidak saja meningkatkan nilai tambah dari lahan tetapi juga ramah lingkungan. Ekonomi yang dibangun melalui pembangunan Sistem Pertanian- Bioindustri Berkelanjutan adalah sistem ekonomi yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya pertanian yang dimiliki di setiap daerah di Kabupaten Lampung Barat, dengan pelaku ekonomi yang tidak hanya melihat kepentingan jangka pendek melainkan yang mampu melihat kepentingan jangka panjang.

- Dana desa di Kabupaten Lampung Barat dianggap masih lemah dalam konteks tepat sasaran untuk menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan sanitasi dasar, dan relatif masih kurangnya ekonomi produktif. Untuk mengoptimalkan potensi masing – masing desa, partisipasi masyarakat diperlukan untuk pembangunan desa. Mendorong penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- Kemajuan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat tidak lepas dari peran investasi. Disarankan kepada Kabupaten Lampung Barat untuk tetap berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Langkah yang dapat

ditempuh untuk merangsang iklim investasi yang baik yaitu dengan perbaikan sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah dengan tidak mengabaikan kehati-hatian. Sehingga dengan pertumbuhan investasi yang baik juga akan memberikan dampak positif untuk Lampung Barat seperti pengembangan sektor usaha baru, memperluas pasar, peningkatan daya saing, pengembangan teknologi baru, penyerapan lapangan pekerjaan baru dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Pemetintah Kabupaten Lampung Barat juga membuka kesempatan bagi masyarakat Lampung Barat untuk berpartisipasi didalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat melalui berinvestasi di bidang perkebunan hortikultura dan kopi serta pariwisata yang menjadi potensi keunggulan Kabupaten Lampung Barat.

- Disarankan untuk penge-lolaan hutan di Kabupaten Lampung Barat tetap diatur menggunakan Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dimana kebijakan Hutan

Kemasyarakatan merupakan upaya pember-dayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Di Sumber Jaya, Lampung Barat, dalam penerapan HKm di tingkat lapang, selain penguatan kelembagaan masyarakat, juga dilakukan penguatan teknis meliputi: teknis konservasi lahan dan diversifikasi tanaman dengan pola tajuk tinggi, sedang dan bawah. Proses perubahan tutupan lahan, yang semula degradasi menjadi sistem hutan kebun melalui agroforestri tersebut, diyakini dapat mendukung Mitigasi Perubahan Iklim (Climate Change). Berikut ini sisi positif dari HKm di Kabupaten Lampung Barat : Pada tahun 2005, beberapa bagian wilayah hutan sudah berubah menjadi kebun campuran dengan jenis tanaman kemiri, alpukat, nangka, durian, mahoni, cempaka, sukun, pinang, dan lain-lain. Sebelum masyarakat membentuk kelompok HKm, pada tahun 1994 ditemukan banyak titik api pada kawasan hutan lindung reg 39. Setelah mengikuti kegiatan HKm, melalui diversifikasi

tanaman, ditemukan penurunan luasan titik api pada lokasi tersebut. Aktivitas HKm dan pengembangannya juga menuju 3 dari 7 misi Millenium Development Goals (MDG's) Mengurangi Kemiskinan, Pelibatan Kaum Perempuan (Gender Perspective) dan Pelestarian Lingkungan.

- Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata dan potensi hasil pertanian dan perkebunan, langkah awal yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Lampung Barat adalah dengan membangun infrastruktur pendukung pertanian dan akses tempat pariwisata. Semakin banyak jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah di Kabupaten Lampung Barat, semakin besar dan mudah pula daerah tersebut terkoneksi dengan daerah lainnya. Peningkatan aksesibilitas daerah dengan pembangunan infrastruktur dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, percepatan pembangunan dan peningkatan efektivitas pembangunan antar kawasan, sehingga target peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat

dicapai. Kemudian demi peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Lampung Barat disarankan untuk melibatkan pihak masyarakat untuk membangun dan menjaga sarana, prasarana dan infrastruktur akses pendukung pariwisata, menjaga dan merawat situs – situs atau lokasi – lokasi wisata yang ada, kemudian melakukan promosi – promosi pariwisata yang lebih baik melalui biro wisata yang ada baik di Kabupaten Lampung Barat maupun biro wisata nasional. Disarankan diadakan perluasan jaringan teknologi, informasi dan komunikasi di akses informasi yang lebih luas di Kabupaten Lampung Barat yang nantinya akan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Lampung Barat. Dengan perluasan jaringan telekomunikasi masyarakat didaerah terpencil dapat mengakses dan melakukan pertukaran informasi yang berguna untuk aktivitas sehari-hari. masyarakat dapat mengakses kejadian terkini didaerahnya, akses informasi perubahan harga komoditas,

akses informasi kebijakan terbaru dari instansi terkait, pemasaran produk lokal berbasis online shop, dan akses informasi lainnya yang dapat berguna untuk pembangunan daerah

Daftar Pustaka

- Abidin, Taufik Zainal. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Swot). Masters Thesis, UNIMED. Medan
- Anwar, A. dan Setiadi. 1996. Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Jakarta: Prisoa.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Asri, A. 2010. Strategi Kebijakan Pembangunan daerah Kabupaten Klaten : Pendekatan Analisis SWOT dan AHP. Universitas Indonesia, Jakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Tata cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2016. Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. 2017. Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2017. Provinsi Lampung Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017- 2022
- Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017.
- Brigham, Eugene F and Joel F. Houston. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. Keuangan. Alih Bahasa : Ali Akbar Yulianto, Buku satu, Edisi sepuluh. Jakarta : Salemba Empat.
- Brojonegoro PS, Bambang. 1992. AHP (the Analytical Hierarchy Process). Pusat
- Antar University – Studi Ekonomi Universitas Indonesia;

- Djunaedi, A. 2002. Proses Perencanaan Strategis Kota/Daerah, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- Djuwendah, Endah., et al., 2013, Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal di Kabupaten Garut, Jurnal Sosiohumaniora Vol. 15, No. 2, Juli 2013, 211 – 221.
- Ekaputra, H Nofidi. 2009. Kajian Pengembangan Strategi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Giatman, M. 2007. Ekonomi Teknik, Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Grant, Eugene L, Grant Ireson and Richard S. Leavenworth. 1996. Dasar-dasar Ekonomi Teknik (Terjemahan), Edisi Ketiga, Jilid Pertama. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hutasoit, Donal. 2005. Strategi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Rangka Mengurangi Laju Kerusakan Hutan: Suatu Pendekatan Analisis SWOT dan AHP. Universitas Indonesia.
- I Nyoman, Sumaryadi. 2005. Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Citra Utama
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2004. Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta.
- Mardianto, Sudi dan Ahmad Djauhari. 2016. Pendekatan Pembangunan Pertanian Berbasis Komoditas vs Ekoregion : Upaya Mencari Jalan Tengah. Jurnal Litbang Pertanian. 2016.
- Pengembangan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Sampang Ovi Resia Arianti Putri, Eko Budi Santoso 2012 JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, Surabaya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Daerah Tertinggal secara Nasional.
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025.

- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.
- Rahmat, Basuki. 2009. Strategi Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Pegunungan dan Pesisir Kabupaten Lampung Barat. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Rangkuti, Freddy. 1997. Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saaty, L. Thomas. 2000. Decision Making For Leaders. University of Pittsburgh;
- _____, 1993, Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks., Pustaka Binaman Pressindo.
- Sitinjak, Robert. 2000. Strategi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia: Analisis SWOT dan AHP. [Thesis]. Universitas Indonesia : Jakarta
- _____. 2002. Manajemen Stratejik di Sektor Publik (Pendekatan Praktis), Buku
- II. Universitas Indonesia
- Soesilo, I Nining. 2002. Reformasi Pembangunan Perlu Pendekatan Manajemen Strategik, Buku I. Universitas Indonesia;
- Stiglitz, Joseph. 1998. Toward New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Prozesse.
- Suganda, Emirhadi. 2008. Pendekatan SWOT dan AHP pada Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Pesisir (Kasus: Pulomerak-Bojonegara Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulistiyorini, Rahayu. 2012. Peluang Pengembangan Transportasi Intermoda Di Provinsi Lampung. Seminar Nasional Peranan Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah, Magister Teknik Sipil UNILA Bandar Lampung, 3 Mei 2012.
- Susaei.Apriana. 2011. Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) Di Kabupaten Barru :Universitas Indonesia.
- Syahza, Almasdi & Suarman. 2013. Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Riau. Vol 14 No. 1 hlm. 126-139.
- Syahza, Almasdi. 2012. Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir Di Propinsi Riau. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- Todaro. M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans.Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.

Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto, Arivina Ratih Taher

Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991

Zulkarnain. Alfian. 2013. *Strategi dan Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Belitung*. Universitas Indonesia;

Emi Maimunah, Dede Supriyanto

*Analisis Produktivitas Individual Tenaga Kerja
Pada Usaha Sewa Mobil KPN “Serba Usaha”*